

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan handal serta memiliki daya saing yang tinggi diperlukan instansi dalam menjalankan kegiatan operasional, sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, sekaligus dapat berperan serta sebagai penunjang bagi instansi pemerintahan dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang saat ini (Abdullah dan Kurniawan, 2014). SDM merupakan elemen paling penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan instansi pemerintahan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pegawai berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Instansi pemerintahan berupaya agar tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan operasionalnya dapat bekerja secara prima sehingga tercapai kinerja pegawai yang optimal. Dengan melakukan kolaborasi yang baik antara penerapan SIPKD dengan kecakapan atau keahlian sumber daya pengelolanya, maka diharapkan instansi pemerintahan akan mendapatkan hasil maksimal dalam usaha pencapaian tujuan akhir yang ingin dicapai.

Penerapan SI pada pemda akan mempengaruhi kinerja pemda dan kinerja individu didalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap kinerja individu dalam pemda tersebut (Astuti, 2008).

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara,2014).Dalam penelitian Goodhue&Thompson(1995), pencapaian kinerja individual dinyatakan berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kecocokan tugas teknologi akan mengarahkan individu untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dengan demikian kesesuaian antara sistem informasi yang diterapkan dengan tugas, kebutuhan dan kemampuan individu di dalam suatu organisasi, akan mempengaruhi pencapaian kinerja.

Anggaran adalah sesuatu yang paling vital bagi negara untuk menjalankan pemerintahan. Pengertian anggaran (budget) menurut Glenn A Welsch adalah "Profit planning and control may be broadly as de fined as sistematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating and control responsibility of management". Dan menurut Munandar (2001:3) adalah "suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Jadi bila anggaran dihubungkan dengan fungsi dasar manajemen maka anggaran meliputi fungsi perencanaan, pengarahkan, pengorganisasi dan pengawasan.

Di Indonesia anggaran Negara setiap tahun disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun secara sederhana bisa diibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi

penerimaan dan sisi pengeluaran. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi.

Ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga dan perusahaan dalam menyusun anggaran juga dihadapi oleh para perencana anggaran negara yang bertanggung jawab menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) yang akan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) nantinya setelah disahkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah (Lasminingsih, 2004 : 223).

Proses penyusunan anggaran baik itu APBN atau APBD seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat, oleh karena itu pembuatan realisasi anggaran menjadi sangat penting.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, laporan realisasi anggaran saat ini khususnya pada laporan pengelolaan keuangan daerah dapat disusun menggunakan sebuah system yang dinamakan SIPKD (Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Penerapan sistem informasi pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi sektor publik akan berpengaruh terhadap kinerja individu dalam organisasi tersebut. Kinerja individu dalam suatu organisasi akan mengalami peningkatan dengan adanya pemanfaatan teknologi seperti penerapan sistem informasi. Penelitian tentang penerapan teknologi sistem informasi terhadap kinerja individu di sektor publik khususnya penerapan SIPKD terhadap kinerja pengelola keuangan daerah masih sangat terbatas.

Peneliti melakukan pra survei terlebih dahulu untuk mengetahui alasan tidak meratanya kualitas kinerja yang terjadi di BAPPEDA Tulang Bawang. Pra survei di sebar kepada 23 responden yang ada di lokasi. Pertanyaan tentang alasan apa yang menyebabkan kinerja yang tidak merata dibuat pertanyaan terbuka, sehingga jawaban responden tidak dipengaruhi. Hasilnya sebagai berikut.

Diagram.1
Hasil Pra survey



Berdasarkan diagram diatas didapat 2 alasan terbanyak mengapa terjadinya penurunan/tidak meratanya kinerja pegawai di BAPPEDA. Diagram diatas menunjukkan bahwa sebanyak 56% atau sebanyak 13 orang memiliki pendapat bahwa faktor Pemahaman SDM, sebanyak 35% atau sebanyak 8 orang berpendapat bahwa faktor Perangkat Pendukung tidak memadai, Sedangkan 9% sisanya atau 2 orang yang lain, memiliki alasan yang lain seperti hal internal lembaga.

Dengan latar belakang tersebut dan hasil pra survey yang di lakukan Penulis mengambil judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas BAPPEDA Wilayah Kabupaten Tulang bawang.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas dapat di uraikan Rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Dengan penerapan SIPKD apakah ada pengaruh bagi Pegawai di BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang?
2. Apakah Pemahaman/kesiapan SDM dalam SIPKD mempengaruhi kinerja pegawai ?
3. Bagaimana pengaruh Perangkat Pendukung dalam penerapan SIPKD terhadap efektifitas kinerja di BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah Batasan. Batasan yang ditetapkan oleh peneliti pada saat melakukan penelitiannya, dalam hal ini terdapat ruang lingkup Subjek, Objek, Waktu, Tempat, dan Ilmu Penelitian. Penjelasannya sebagai berikut :

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Subjek Penelitian adalah tempat variabel melekat, Subjek dalam penelitian ini adalah penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kinerja Pegawai.

1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Objek Penelitian ini adalah pada Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab Tulang Bawang.

1.3.3 Ruang Lingkup Waktu

Waktu Pelaksanaan Penelitian ini Di laksanakan Pada Maret 2020 – September 2020.

1.3.4 Ruang Lingkup Tempat

Tempat melakukan penelitian ini di BAPPEDA Daerah Kab Tulang Bawang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bahwa terdapat dampak/pengaruh Pemahaman SDM, perangkat pendukung dalam kinerja Pegawai BAPPEDA daerah Tulang Bawang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Wilayah Kabupaten Tulang bawang, antara lain :

1.5.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah, dan bagi penulis sendiri, merupakan bentuk nyata penambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya. dan meningkatkan pengetahuan penulis tentang pengelolaan keuangan daerah.

1.5.2 Bagi BAPPEDA daerah Tulang Bawang

Peneliti memberikan Perspektif yang berbeda, dimana sebagai media pemberian saran dan masukan mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh Pegawai secara langsung dalam Lingkungan BAPPEDA Daerah Tulang Bawang. Sehingga dapat memberikan hal yang terbaik serta meningkatkan kinerja Pegawai kedepannya apabila terdapat kekurangan.

1.5.3 Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini dikelompokkan menjadi beberapa Bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

1.6.1 Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdapat dan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.3 Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi jenis penelitian yang digunakan, sumber data, pengumpulan data, penentuan populasi dan sampel, metode pengolahan data, rumus yang digunakan dalam penelitian, pendekatan dan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

1.6.4 Bab IV : Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini dilaporkan hasil-hasil penelitian. Penyajian mengikuti butir-butir tujuan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian. Penyajian hasil penelitian diikuti oleh pembahasan.

1.6.5 Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Dalam bab ini disajikan penafsiran pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang telah diperolehnya. Beserta saran yang disampaikan kepada pihak-pihak.